



# JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume V/No.2/Oktober 2013

ISSN : 2086-0447

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DAGANG PADA KOPERASI

**Adi Rachmanto**

**Dadan Kusumawardana**

ANALISIS KAS RATIO DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

**Arni Purwanti**

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

**Kusuma Dani**

**Ony Widilestariningtyas**

**Juan Kasma**

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees)

**Lusiana Jayanti Sara**

**Ery Rahmat**

PENGARUH KESEHATAN KEUANGAN BANK TERHADAP NILAI INVESTASI MASYARAKAT DALAM SAHAM BANK

**Ning Wahyuni**

DUKUNGAN TOP MANAJEMEN PAD ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

(Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Bandung)

**Adeh Ratna Komala**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375

Email : [akuntansi@email.unikom.ac.id](mailto:akuntansi@email.unikom.ac.id)



**PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)**

Oleh:  
**KUSUMA DANI  
ONY WIDILESTARININGTYAS  
JUAN KASMA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIKOM**

**ABSTRAK**

*Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh negara, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti peningkatan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Unit observasi dalam penelitian ini adalah 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 dengan unit analisis pegawai account representative yang berjumlah 53 orang. Pengujian statistik yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21 untuk Microsoft Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, secara simultan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan (Nurmantu, 2003:148). semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003:148). Menurut John Hutagaol (2006), masalah

kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hamper semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Chaizi Nasuha (2004:37) mengatakan sistem administrasi pajak modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, ataupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan, mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sistem administrasi pajak modern menurut dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) adalah maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Menurut Agus Martowardojo pada 2011 lalu yang menyatakan fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah.

Wajib pajak yang sudah memahami aturannya perpajakan pun bisa keliru dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya, apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani wajib pajak dan usahanya (Irwansyah Lubis, 2010:101). Masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan (Irwansyah Lubis, 2010:101). Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang (Irwansyah Lubis, 2010:101).

Menurut John Hutagaol (2006), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan. Masih menurut John Hutagaol (2006), penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum pajak sehingga ditaati oleh masyarakat wajib pajak (Ridwan 2005:57).

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Seberapa besar pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1.
- 2) Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1.
- 3) Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi pajak modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Menurut Chaizil Nasucha (2004:37) "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) “Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan moderen adalah suatu penerapan sistem administrasi pajak yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan dalam bentuk individu ataupun lembaga dalam hal pelayanan hak dan kewajiban wajib pajak yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Chaizil Nasucha (2004:69), indikator sistem administrasi perpajakan modern adalah “Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organisasi”.

## **2.2 Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sementara menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) “Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.

Dan menurut Early Suandy (2008:155) mengatakan bahwa “Sanksi perpajakan adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) indikator sanksi perpajakan adalah “Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana”.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut “Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah “sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak paham dan berusaha taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mendefinisikan Indikator kepatuhan wajib pajak adalah “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan,

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan”.

## **2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **2.4.1 Kerangka Pemikiran**

#### **2.4.1.1 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan sebagai berikut “Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak”.

#### **2.4.1.2 Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan “Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya”.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

### 3.2 Desain Penelitian

Menurut Nur Indriantoro (2002:249) desain penelitian adalah rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data.

Menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

1. Sumber masalah;
2. Rumusan masalah;
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan;
4. Pengajuan hipotesis;
5. Metode penelitian;
6. Menyusun instrumen penelitian;
7. Kesimpulan”.

### 3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) pengertian operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indicator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

### 3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak, sedangkan sampel yang digunakan adalah metode "*Random Sampling*", karena tidak semua populasi di jadikan sampel, maka sampel yang digunakan ialah sampel acak. Anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 66 sampel.

### 3.5 Metode Pengujian Data

#### 3.5.1 Rancangan Analisis

##### 1. Analisis Deskriptif

Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rentang kriteria penilaian sebagai berikut:



$$\text{Skor} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang Skor Ideal telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban tertinggi. Penjelasan bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada table berikut:

#### Kriteria Presentase Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Sangat Rendah/Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Rendah/Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4	68.01% – 84.00%	Tinggi/Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Tinggi/Sangat Baik

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:46)

## 2. Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2010:14) menjelaskan bahwa analisis verifikatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### A. Pengujian Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian signifikansi koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

## 2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- a. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- b. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF).

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

(Sumber: Gujarati, 2004: 351)

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Menurut Gujarati (2004: 406) sebagai berikut:

“Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen)”.

## 3. Analisis Statistik

### a. Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple)

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai

indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2) Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

(Sumber: Sugiono, 2009:192)

Dimana:

- Y = variabel tak bebas (kepatuhan wajib pajak)
- A = bilangan berkonstanta
- b1,b2 = koefisien arah garis
- X1 = variabel bebas (sistem administrasi perpajakan modern)
- X2 = variabel bebas (sanksi perpajakan)

### b. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas secara parsial, yaitu sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap variabel tidak bebas yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan menggunakan korelasi parsial. Menurut Umi Narimawati (2010:49), pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variable X dan Y, dapat menggunakan pendekatan korelasi Pearson dengan rumus dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n(\sum X_i^2) - (\sum X_i)^2\}\{n(\sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi
- n = Jumlah data
- X = Variabel Bebas (Independen)
- Y = Variabel Terikat (Dependen)

### c. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan dengan dengan kepatuhan wajib pajak pada 5 KPP di kanwil DJP jabar 1. Rumus dari korelasi berganda adalah:

$$R_{Y.X1X2} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

- R = Koefisien korelasi berganda
- X1 = sistem administrasi perpajakan modern
- X2 = Sanksi Perpajakan
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- n = Banyaknya Sampel

Kuat atau tidaknya hubungan antara ketiga variabel dapat dilihat dari beberapa kategori koefisien korelasi mempunyai nilai  $0 \leq R \leq 1$  dimana:

- a. Apabila  $R = 1$ , maka korelasi antara ketiga variabel dikatakan sempurna; dan
- b. Apabila  $R = 0$ , maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.

### B. Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:

- Kd = Koefisien Determinasi atau Seberapa Jauh Perubahan Variabel Y Dipergunakan oleh Variabel X
- $r^2$  = Kuadrat Koefisien Korelasi
- 100% = Pengkali yang menyatakan dalam persentase

### 3.6 Pengujian Hipotesis

#### 1. Penetapan Hipotesis

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t):

$H_0 : \beta_1 = 0$  Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$  Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_2 = 0$  Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$  Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F):

$H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$  Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \beta_1 \beta_2 \neq 0$  Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

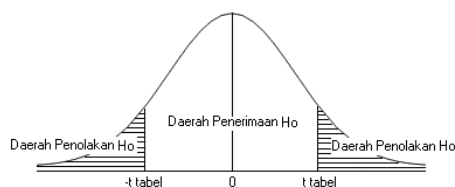
#### 2. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikan ditentukan dengan 5% dari derajat bebas ( $dk$ ) =  $n - k - 1$ , untuk menentukan  $t_{tabel}$  sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel–variable yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

#### 3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Hasil  $t_{hitung}$  dibandingkan  $t_{tabel}$  dengan kriteria:
  - a. Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penolakan, berarti  $H_i$  diterima artinya antara variable X dan variable Y ada pengaruhnya.
  - b. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan, berarti  $H_i$  ditolak artinya antara variable dan variable Y tidak ada pengaruhnya.
  - c.  $t_{hitung}$ ; dicari dengan rumus perhitungan  $t_{hitung}$ , dan
  - d.  $t_{tabel}$ ; dicari di dalam tabel distribusi  $t_{student}$  dengan ketentuan sebagai berikut,  $\alpha = 0,05$  dan  $dk = (n-k-1)$ .]



Gambar 3.1  
Kurva Pengujian Hipotesis Parsial

- 2) Hasil  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan kriteria:
- Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada alpha 5% untuk koefisien positif.
  - Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
  - Tolak  $H_0$  jika nilai  $F\text{-sign} < \alpha$ ),05.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

###### 4.1.1 Analisis Deskriptif

###### 1. Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dari data yang dihasilkan dapat dilihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 1735 dan skor ideal untuk 8 pernyataan sebesar 2120. rumus di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 1735 dan skor ideal yang dicapai sebesar 2120. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 81,8%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sistem administrasi perpajakan modern dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern ini.

###### 2. Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan

Dari data yang dihasilkan dapat dilihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 774 dan skor ideal untuk 4 pernyataan sebesar 1060. Berdasarkan rumus di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh sanksi perpajakan sebesar 774 dan skor ideal yang dicapai sebesar 1060. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 73,0%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini

menunjukkan bahwa walaupun sanksi perpajakan dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel sanksi perpajakan ini.

### 3. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keseluruhan jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 1376 dan skor ideal untuk 4 pernyataan sebesar 2120. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 64,9%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 52,1% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terdapat fenomena dalam variabel ini.

#### 4.1.2 Analisis Verifikatif

##### 1) Hasil Pengujian Asumsi Klasik

- a. Uji Asumsi Normalitas diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi yang diperoleh variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi telah terdistribusi normal.
- b. Uji Asumsi Multikolinieritas, diperoleh dari nilai VIF masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.
- c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

##### 2) Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil perhitungan koefisien regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 2,714 + 0,495X_1 + 0,578X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 2,714, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 2,714.
- b. Nilai penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,495, memiliki arti bahwa jika penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan sedangkan variabel sanksi perpajakan konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,495.
- c. Nilai sanksi perpajakan sebesar 0,578, memiliki arti bahwa jika sanksi perpajakan mengalami peningkatan sedangkan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,578.

## **A. Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Korelasi**

Dengan menggunakan program software SPSS 21, bahwa nilai korelasi antara system administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,484. Nilai korelasi sebesar 0,484 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel penerapan system administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak.

### **2. Koefisien Determinasi**

Diperoleh hasil koefisien determinasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 0,2057 atau 20,57% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan modern sebesar 20,57%.

### **3. Pengujian Hipotesis Parsial X1**

Nilai  $t_{hitung}$  untuk Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 3,642 dan  $t_{table}$  sebesar 2,009. Dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{table}$  ( $3,642 > 2,009$ ) dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **B. Pengaruh Account Representative dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Korelasi Berganda**

Dengan menggunakan program software SPSS 21, bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,584. Nilai 0,584 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik penerapan system administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan, maka akan diikuti oleh semakin baiknya kepatuhan wajib pajak.

### **2. Koefisien Determinasi**

Diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,341 atau 34,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,1%, sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 34,1\% = 65,9\%$  merupakan pengaruh atau kontribusi dari variable lain yang tidak diteliti selain variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan.

### **3. Pengujian Hipotesis Simultan**

Nilai Fhitung yang diperoleh sebesar 12,916 dengan p-value (sig) = 0,000 Dengan  $\alpha=0,05$ ,  $df_1=2$ , dan  $df_2= (n-k-1) = 50$ , maka di dapat  $F_{tabel} = 3,183$  Dikarenakan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $12,916 > 3,183$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,495. Angka tersebut memiliki arti apabila terjadi peningkatan pada sistem administrasi perpajakan modern diperkirakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,495. Jadi semakin besar atau meningkatnya sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Karena sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif atau bergerak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,2057 atau 20,57% sedangkan sebesar 79,43% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat dikatakan sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **4.2.2 Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian regresi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,578. Angka tersebut memiliki arti apabila terjadi peningkatan pada sanksi perpajakan diperkirakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,578. Jadi semakin besar atau meningkatnya sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Karena sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif atau bergerak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,1347 atau 13,47% sedangkan sebesar 86,53% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.2.3 Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap**

Hasil penelitian regresi menunjukkan nilai konstanta untuk sebesar 2,714, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 2,714.

Besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar sebesar 34,1% sedangkan sisanya sebesar 65,9% merupakan kontribusi pengaruh variabel lain yang tidak diteliti merupakan faktor-faktor lain. Hubungan system administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persentase sisanya di pengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Lalu hasil pengujian uji F yang diperoleh menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak sehingga menerima  $H_1$  Karena hasil uji Fhitung lebih besar dari Ftabel. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa system administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Perkembangan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan setiap waktunya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak itu berarti semakin baik system administrasi perpajakan modern diterapkan. Berdasarkan analisis perhitungan statistik pada persamaan regresi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan telah banyak mengalami peningkatan dari segi ketegasan. Adanya wajib pajak yang masih terkena sanksi perpajakan baik sanksi administrasi ringan sampai berat dan sanksi pidana dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Semakin tegas dan berat sanksi yang

mengancam wajib pajak maka akan meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis perhitungan statistik pada persamaan regresi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 untuk itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan, tetapi dapat juga digunakan variabel lain seperti kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dalam mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Supangat. 2007. Standar Akuntansi Keuangan, Yogyakarta:Salemba.
- Barker et al. 2002. Research Methods In Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd. England.
- Chaizi Nasucha. 2004 Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik, Jakarta : Grasindo.
- Damodar Gujarati. 2004. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.

- Early Suandy. 2008. Hukum Pajak, Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.
- Husein Umar. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.
- Irwansyah Lubis. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- John Hutagaol. 2006. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus- September 2006.
- Marcus Taufan Sofyan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Skripsi Sains Terapan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moh. Nazir. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mohammad Zain. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Indriantoro. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grani.
- Simanjuntak Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.
- Siti Resmi. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Denovano dan SitiKurnia Rahayu. 2006.Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Medio Grup.
- Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.

- Uma Sekaran. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.
- Umi Narimawati. 2008. Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah Bekasi: Genesis



ISSN 2086-0447



9 772086 045558